



# PROSEDING

**DISKUSI NASIONAL**

# ARSITEK SASRA - MATRA

**MULTI DIMENSIONAL ARCHITECTS  
SEMARANG - 9 JUNI 2009**



Editor :  
Dr.Ir. EDI PURWANTO, MT  
SUKAWI, ST, MT



Diselenggarakan oleh :  
**JURUSAN ARSITEKTUR  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



Diterbitkan oleh :  
**BADAN PENERBIT  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
ISBN No. 978.979.704.753.5**



# PROSEDING

## DISKUSI NASIONAL ARSITEK SASRA - MATRA

**MULTI DIMENSIONAL ARCHITECTS**  
SEMARANG - 9 JUNI 2009



Editor :  
Dr.Ir. EDI PURWANTO, MT  
SUKAWI, ST, MT



Diselenggarakan oleh :  
JURUSAN ARSITEKTUR  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO



Diterbitkan oleh :  
BADAN PENERBIT  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
ISBN No. 978.979.704.753.5

**DISKUSI NASIONAL  
ARSITEK SASTRA-MATRA**

Semarang, 9 Juni 2009

Gedung Prof. Soedarto, SH  
Kampus Universitas Diponegoro Tembalang Semarang

Diselenggarakan oleh :  
**JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**TIM REVIEWER :**

Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc.  
Prof. Ir. Edy Darmawan, M.Eng.  
Dr. Ir. Ing. Gagoek Hardiman  
Dr. Ir. Eddy Prianto, CES, DEA.  
Dr. Ir. Edi Purwanto, MT

Diterbitkan Oleh :  
**BADAN PENERBIT UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
ISBN : 978.979.704.753.5

## KATA PENGANTAR

Dalam disertasi doktrinya yang telah diterbitkan menjadi buku : "*Architecture and the Crisis of Modern Science*" (The MIT Press, 1994), Alberto Peres-Gomes menohok dengan telak : "*Even today, most architects fail to understand the semantic and transcendental dimension of meaning in architecture*". Kebanyakan para arsitek terpaku pada *syntactic dimension*, sibuk mengolah bentuk dan struktur untuk mewedahi fungsi, serba formal, imanen, dan prosaik. Kekayaan, keragaman, dan ambiguitas dalam dimensi semantik dan transendental, yang menyangkut makna kultural, simbolik, dan puitik, cenderung terabaikan.

Tudingan yang menyengat semacam itu perlu jadi renungan bersama para arsitek di segenap pelosok nusantara tercinta, baik yang mengemban amanah sebagai ilmuwan, profesional, pejabat pemerintah, pengusaha, maupun yang bergulat sebagai arsitek kaki telanjang.

Kita tak boleh abai pada makna hakiki arsitektur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari seni kehidupan yang amat berpengaruh terhadap kebahagiaan manusia dan kualitas lingkungannya, yang selalu berubah.

Manakala para pengusaha di dunia bisnis dituntut untuk menerapkan kaidah '*Corporate Social Responsibility*,' para arsitekpun seharusnya menyiapkan diri bila suatu saat dituntut agar mengemban tanggung jawab sosial arsitek. Salah satu tanggung jawab arsitek adalah menciptakan lingkungan fisik dan non fisik yang lebih manusiawi, unik dan atentik, selaras dengan norma, tata nilai, adat dan perilaku manusianya, serta ramah lingkungan sesuai *locus solus*-nya.

Untuk memenuhi tuntunan itu, arsitek mesti memiliki visi, perasaan, persepsi, fikiran, sikap, dan tindakan yang serba multi dimensi atau sasra-matra. Arsitek adalah pengawal peradaban, dan dengan energi kreatifnya dan idealisme sosialnya mesti memandu keberlanjutan pembangunan demi kemaslahatan umat manusia.

Penyusunan proseding Dikusi Nasional Arsitek Sasra Matra adalah sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut di atas. Proseding ini berisi tentang [i] Teori dan Kritik Arsitek, [ii] Arsitektur dan Perilaku, [iii] Perumahan dan Permukiman, [iv] Pembangunan Kota Berkelanjutan menghadapi Tantangan Global, [v] Perubahan Iklim dan Penataan Ruang, [vi] Konservasi Warisan Budaya, [vi] Sejarah Arsitektur Indonesia

Selain itu, penyusunan dan penerbitan proseding ini ditujukan pada dedikasi Guru Besar kami Prof.Ir. Eko Budihardjo, M.Sc. yang pada tanggal 9 Juni 2009 akan purna tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Beliau boleh saja purna tugas, namun dedikasi, pemikiran dan tugas yang diemban sebagai seorang pemikir dan arsitek akan selalu berjalan terus seiring dengan perjalanan hidup beliau dan akan terus memberikan cahaya bagi khasanah keilmuan dibidang arsitektur khususnya arsitektur yang berbasis pada kekuatan lokal.

Panitia

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
1. KEBUDAYAAN MASYARAKAT POST-MODERNIS DAN PERKEMBANGAN PERANCANGAN ARSITEKTUR MASA KINI UDJIANTO PAWITRO .....	1
2. KONFLIK SPASIAL DI TROTOAR: ANTARA RUANG BERJALAN KAKI DAN BERDAGANG JOKO ADIANTO .....	8
3. LINTASAN MATAHARI DAN PENGARUHNYA PADA BANGUNAN MARWOTO .....	15
4. BELAJAR MEMBACA ASPEK-ASPEK KEARIFAN LOKAL DAN MEN TRANSFORMASIKAN KE DALAM DESAIN ARSITEKTUR HARDIYATI .....	23
5. ARSITEKTUR DAN PERUBAHAN IKLIM DALAM TANTANGAN PROSES DESAIN ARSITEKTUR EDDY INDARTO .....	29
6. STUDI PERILAKU: SERING DIABAIKAN NAMUN PENTING TITIEN SARASWATI .....	38
7. MIXING METHODOLOGY DALAM RISET ARSITEKTUR YUKE ARDHIATI .....	46
8. UPAYA REVITALISASI BANGUNAN KUNO DI KAUMAN SURAKARTA MUSYAWAROH .....	54
9. KONSTRUKSI RUMAH TRADISIONAL KUDUS AGUNG BUDI SARDJONO .....	62
10. NEO VERNAKULAR SEBAGAI PENDEKATAN RANCANGAN ARSITEKTUR JUNianto .....	69
11. SUPERIMPOSE KAJIAN PRINSIP DARI SEGI BENTUK ARSITEKTURAL SATRIO NUGROHO .....	78
12. KAWASAN PESISIR SEBAGAI VENTILASI UDARA LINGKUNGAN PERKOTAAN J U H A N A .....	86
13. MENUJU ECUMENOPOLIS : SEBUAH TANTANGAN MEMPERKUAT IDENTITAS KOTA PEMBAYUN SEKARINGTYAS .....	94
14. KEBISINGAN PADA KAWASAN PERUMAHAN PERKOTAAN SEPUTAR BANDAR UDARA, STUDI KASUS : PERUMAHAN SEPUTAR BANDARA AHMAD YANI SEMARANG ERNI SETYOWATI .....	98
15. PENGARUH NILAI-NILAI ISLAMI PADA EKSPRESI ARSITEKTUR PADA PERMUKIMAN ISLAMI DI SEKITAR KOMPLEK MASJID AGUNG DEMAK WIDYASTUTI NURJAYANTI .....	107

16. KAWASAN PINGGIRAN KOTA BAMBANG SETIOKO .....	120
17. SUSTAINABILITY DAN INCLUSIVITY : MULTI PENDEKATAN DESAIN BERORIENTASI MANUSIA-RUANG-LINGKUNGAN YUSITA KUSUMARINI .....	128
18. NILAI STRATEGIS REVITALISASI GEDUNG FILATELI EKS- KANTOR POS LAMA PASAR BARU JAKARTA PENGEMBANGAN FUNGSI DAN PENGUATAN SIMBOL KOTA SUDARMAWAN JUWONO, SUTEJO, KETI ANDAYANI .....	135
19. PERAN PERAHU DALAM KONSEP DASAR PERWUJUDAN ARSITEKTUR NUSANTARA YANG MARITIM, KASUS STUDI: PERAHU SEBAGAI SIMBOL HARMONI DALAM ARSITEKTUR VERNAKULAR SABU SIPRIANUS W. GOETHA .....	144
20. URGENSI KAJIAN JENTRIKASI RUANG KOTA: BELAJAR DARI MODEL KASUS NEGARA LAIN MUHAMMAD SANI ROYCHANSYAH.....	155
21. PEMBERDAYAAN BAMBU SEBAGAI BAHAN BANGUNAN PERUMAHAN YANG EKOLOGIS SUKAWI DAN SRI HARTUTI WAHYUNINGRUM .....	164
22. PELUANG HEMAT ENERGI PADA GEDUNG BERTINGKAT TINGGI DARYANTO .....	171
23. MEMAHAMI „KAYU DAN BAMBU SEBAGAI ARSITEKTUR TANPA PAKU“ PADA PERMUKIMAN ARSITEKTUR VERNAKULAR NUSANTARA PADA KASUS RUMAH TENGGER DI DUSUN CEMORO LAWANG – BROMO IMAM SANTOSO .....	178
24. PRANATA PEMBANGUNAN DALAM ARSITEKTUR (KAJIAN PENDEKATAN SISTEM DALAM JASA KONSTRUKSI) BUDI SUDARWANTO .....	185
25. PERMUKIMAN TRADISIONAL SEBAGAI ASET WISATADI SULAWESI TENGAH AHDA MULYATI MULUK .....	196
26. PERGESERAN NILAI ARSITEKTUR TRADISIONAL <i>TONGKONAN</i> PADA BENTUK DAN FUNGSI RUMAH BUGIS DALAM PERMUKIMAN TRADISIONAL TORAJA TINJAUAN KHUSUS PADA RUANG DALAM DAN RUANG LUAR GATOR TIMBANG .....	203
27. KONSEP MEMORI DAN KONSERVASI HADI WAHYONO .....	210
28. CREATIVITY IN LIMITED FACILITIES IN INFORMAL SETTLEMENT AS A MARGINALIZED ARCHITECTURE IN URBAN AREAS PAULUS BAWOLE .....	220
29. POSTMODERN ARCHITECTURE & POSTMODERNISM A. RUDYANTO SOESILO .....	230
30. KONSEP TATA SPASIAL TERITORIAL DI BALIK UPACARA ADAT MENDINGINKAN DI DESA KAENBAUN DJAROT PURBADI, SUDARYONO, HARYADI dan ACHMAD DJUNAEDI .....	236

31. "LIVING ARRANGEMENT" LANSIA SEBAGAI DASAR KONSEP PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG BERKELANJUTAN WIJAYANTI .....	244
32. STUDI EKSPLORASI RUANG KOTA MAGELANG PERIODE KERAJAAN MATARAM KUNO DAN MATARAM BARU WAHYU UTAMI .....	250
33. NILAI-NILAI GENDER DALAM EKSPRESI RUANG RUMAH TINGGAL TRADISIONAL NUSANTARA TITIEN WORO MURTINI .....	257
34. ADAPTASI BUDAYA BERMUKIM MASYARAKAT PESISIR DALAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN, (BELAJAR DARI KASUS PERMUKIMAN BANDENGAN KENDAL) MILA KARMILAH DAN FATHIE KUMALASARI .....	265
35. MAKNA KEBERLANJUTAN DAN PERUBAHAN ORIENTASI PADA KAMPUNG DI PUSAT KOTA PESISIR, (Studi Kasus Kampung Kauman Semarang) ATIEK SUPRAPTI BUDIARTO .....	273
36. IMAJINASI KOLEKTIF SEBAGAI DAYA HIDUP RUANG PERKOTAAN – KAJIAN <i>SPIRIT OF PLACE</i> BERBASIS LOKALITAS EDI PURWANTO .....	285
37. GEOMETRI SEBAGAI ACUAN (KREATIFITAS) BENTUK ARSITEKTURAL (KASUS GUARDIOLA HOUSE KARYA PETER EINSEMEN) ABDUL MALIK .....	296
38. PERKEMBANGAN BENTUK DAN KONSTRUKSI RUMAH TRADISIONAL TAMBI DI DESA BEHOA KABUPATEN POSO ANDI JIBA RIFAI. B DAN PUTERI FITRIATY .....	310
39. MENDAMBA PENGETAHUAN ARSITEKTUR (DARI) NUSANTARA BAMBANG SUPRIYADI .....	320
40. PERUBAHAN STRUKTUR PERMUKIMAN SEBAGAI DAMPAK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI WILAYAH RUANG PERBATASAN STUDI KASUS: PERUMAHAN DI SURABAYA- SIDOARJO PINDO TUTUKO .....	329
41. URBAN GREEN SPACE (FUNGSI VEGETASI DALAM TAMAN AHMAD YANI) SEBAGAI URBAN EKOLOGI YANG BERKELANJUTAN DI KOTA MEDAN ARDIANSYAH .....	340

# **Adaptasi Budaya Bermukim Masyarakat Pesisir dalam Pembangunan Permukiman (Belajar dari Kasus Permukiman Bandengan Kendal)**

**Mila Karmilah<sup>1</sup> dan Fathie Kumalasari<sup>22</sup>**

## **Abstrak**

*Perumahan dan permukiman merupakan sektor yang strategis untuk membangun manusia Indonesia yang seutuhnya, karena rumah memiliki fungsi yang sangat strategis di dalam mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi mendatang yang berjiwa. Penyelenggaraan perumahan dan permukiman diarahkan untuk mengusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi dimana setiap orang atau keluarga di Indonesia mampu bertanggung jawab memenuhi kebutuhan perumahannya yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan permukiman yang reponsif dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang produktif. Permukiman di Kawasan Bandengan adalah permukiman yang diperuntukkan bagi masyarakat nelayan yang direlokasi dari Bantaran Kali Kendal pada tahun 2003. Pengadaan permukiman tersebut mendapat bantuan dari Pemerintah Negara Kuwait. Namun di dalam pembangunan permukiman tersebut sama sekali tidak memperhatikan kelompok masyarakat pengguna khususnya Nelayan, yang secara sosial budaya berbeda dengan masyarakat lainnya. Permukiman yang dibangun tersebut berjumlah 40 buah dengan model kopel, yang luasnya 35 m<sup>2</sup> sehingga di dalam pengembangannya menjadi tidak terkendali, hampir seluruh keluarga yang menempati permukiman tersebut melakukan pengembangan, sesuai dengan kebutuhannya. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kekumuhan pada permukiman tersebut. Selain kondisi yang kumuh maka penyediaan fasilitas sanitasi lingkungan juga tidak mendapat perhatian sehingga hampir seluruh warga menggunakan Kali Kendal sebagai sarana MCK. Hal ini didasarkan teori-teori yang menitikberatkan pada hasil pekerjaan para perencana dan perancang, dan mengabaikan karakter lingkungan yang unik yang didesain oleh rakyat biasa (tradisi populer masyarakat) yang dibangun melalui pemahaman perilaku dan lingkungan budaya lokal (Rapoport, 1984).<sup>3</sup>*

*Berdasarkan kondisi tersebut, maka kedepan di dalam pembangunan perumahan dan permukiman perlu memperhatikan kebutuhan dan karakteristik bagi masyarakat pengguna khususnya masyarakat yang mempunyai kondisi sosial budaya berbeda (masyarakat nelayan), serta lingkungan fisiknya.*

**Key World: Adaptasi, Budaya Bermukim, Masyarakat Pesisir**

## **Pendahuluan**

Permasalahan perumahan merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh negara berkembang (*developing countries*). Ledakan penduduk perkotaan akibat faktor migrasi desa-kota yang cukup tinggi memunculkan biaya biaya sosial yang luar biasa besarnya untuk penyediaan perumahan yang layak dan jasa-jasa sosial lainnya. Seiring dengan terus meluasnya urbanisasi tumbuh subur pula kantong-kantong permukiman kumuh (*slum*) dan kampung-kampung kumuh tengah kota (*shantytown*) serta semakin banyak penduduk kota yang tinggal berimpit di pusat permukiman yang sebenarnya tidak layak huni (Todaro, 2000).

Beragam upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan rumah yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia telah direncanakan sejak awal kemerdekaan dengan penyelenggaraan Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung tanggal 25-

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar T. Perencanaan Wil dan Kota Unissula Semarang

<sup>2</sup> Staf Pengajar Prodi Planologi STTNAS Yogyakarta

30 Agustus 1950 sampai munculnya UU No. 1/1964 Tentang Pokok-Pokok Perumahan, yang realisasi secara besar-besarnya baru diadakan pada Pelita II tahun 1974. Pada tahun yang sama lembaga pendukung penanganan masalah perumahan seperti Badan Kebijakan Nasional Perumahan, Perum Perumnas dan BTN sebagai bank Hipotik juga dibentuk (Sumiarto, 1993).

Segala upaya di atas memang belum membuahkan hasil dan permasalahan perumahan dan permukiman di Indonesia juga semakin besar. Permasalahan ini tidak hanya pada upaya penyediaan, tetapi juga untuk mengganti yang rusak mengingat kondisinya masih jauh dari memenuhi syarat kelayakan sebagai rumah tinggal. Banyak program-program rumah sederhana atau perbaikan kampung dipertanyakan apakah program-program tersebut sudah menjangkau dan sesuai dengan kelompok sasaran yang dituju, yaitu masyarakat miskin yang membutuhkan perumahan.

## **A. Kajian Teoritik**

### **A.1. Karakteristik Masyarakat Pesisir**

Secara garis besar terdapat beberapa ciri-ciri masyarakat pesisir sebagai representasi komunitas desa pantai dan desa terisolasi tersebut. Adapun ciri-ciri tersebut adalah: (1) sistem pengetahuan; (2) sistem kepercayaan; (3) struktur sosial; (4) peran perempuan dan (5) posisi sosial nelayan. Kelima aspek tersebut membentuk karakteristik masyarakat pesisir yang lebih egaliter dan agama sangat berperan didalam hubungan masyarakat (Satria. A 2002 dan Zahri. N 2007)

### **A.2. Pembangunan Perumahan dan Permukiman**

Pola pembangunan perumahan dapat dikategorikan atas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di satu sisi dan pembangunan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat di sisi lainnya. Data empiris menunjukkan bahwa cara pengadaan perumahan tersebut diatas hanya mampu menyediakan  $\pm 15\%$  dari kebutuhan perumahan nasional setiap tahunnya. Kekurangan sebesar 85% kebutuhan dipenuhi sendiri secara swadaya oleh masyarakat.

Pola pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah serta pengembang swasta adalah skema pengadaan perumahan yang ditawarkan melalui mekanisme pasar formal dengan fasilitas kredit bagi pembelinya. Pola pembangunan seperti ini pada akhirnya terbentur pada kenyataan:

Rendahnya kemampuan masyarakat untuk menjangkau harga rumah yang ditawarkan melalui pasar formal. Kenaikan pendapatan tidak seimbang dengan kenaikan harga rumah dan lahan, sehingga daya beli (affordability) masyarakat secara relatif makin menurun dari tahun ke tahun. Hal inilah yang menyebabkan pola pembangunan perumahan yang ada belum mampu menjangkau segmen masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam situasi ketidak-mampuan tersebut, kebutuhan akan hunian yang tidak terakomodasi pasar pada akhirnya mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan sendiri pengadaan perumahan dan pemukimannya secara swadaya. Secara nyata apa yang terjadi pada permukiman di sebagian besar kota-kota di Indonesia menunjukkan bahwa permukiman yang terbentuk sebagian besar (> 65%) adalah kreasi dari warga kotanya secara swadaya.

Perumahan dan permukiman yang dibangun oleh masyarakat memiliki ciri-ciri pembangunan yang bersifat individual, menghasilkan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan kemampuan ekonominya (ala kadarnya). Rumah-rumah yang dibangun secara individual tersebut, kemudian membentuk permukiman yang kemudian tumbuh dan berkembang secara incremental dengan pola pertumbuhan yang tidak teratur.

Pemukiman yang terbentuk sebagai akibat pembangunan yang dilakukan oleh perorangan-perorangan secara swadaya tersebut, diyakini apabila tanpa suatu pemampuan, penguatan dan pengarahan yang cukup akan membentuk lingkungan permukiman yang tidak teratur dan tumbuh secara tidak terkendali dan menghasilkan suatu permukiman yang tidak memenuhi syarat-syarat permukiman yang sehat. Yang kemudian kita kenal dengan berbagai istilah, antara lain: slum (permukiman kumuh), squatter (permukiman liar), permukiman marginal, kampung kumuh, kampung kota dan lain-lain (Sultan Hidayat, 2003).

Unsur permukiman itu sendiri antara lain berupa wadah, tanah/lahan yang digunakan dan pengisi penghuni yang terdiri dari makhluk hidup dan benda tak hidup. Permukiman dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) karakter yaitu: 1) more agriculture (traditional countries) dengan ciri pertanian menjadi mata pencaharian utama (Irian Jaya); 2) Development (berkembang) daerah yang sedang giat membangun (Kalimantan dan Sumatra) dan 3) more industrial (maju) banyak industri skala besar, banyak muncul usaha jasa dan pelayanan, dan tingkat kepadatan relatif tinggi

## **B. Deskripsi Permasalahan**

Hakekat perkembangan permukiman di setiap wilayah adalah perubahan yang dapat terjadi secara terencana maupun secara fisik terencana. Hal ini berakibat pada perkembangan kuantitas dan kualitas permukiman bervariasi secara keruangan. Beberapa masalah di wilayah pesisir yang berkaitan dengan ruang wilayah antara lain belum serasinya perkembangan dan keterkaitan aktifitas pertanian dengan sektor lainnya dalam pengembangan wilayah sebagai satu kesatuan, masih banyaknya kerusakan lingkungan akibat inversi lahan, dan masih kurang layaknya kondisi lingkungan perumahan dan permukiman beserta sarana dan prasarana permukiman penduduknya (Pascionne, 1984; Riyadi, 2000).

Adaptasi nelayan terhadap pembangunan permukiman yang tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat nelayan merupakan permasalahan yang akan ditulis. Seperti yang diketahui bahwa selama ini pembangunan perumahan dan permukiman merupakan masalah yang harusnya menjadi salah satu prioritas pemecahan masalah.

## **C. Kajian permasalahan berdasarkan Teori**

Pada kawasan Bandengan terdapat 2 (dua) jenis rumah yaitu rumah yang dibangun dengan mendapatkan tanah kemudian membangun sendiri rumahnya, sebanyak 25 buah kemudian yang kedua adalah rumah didapatkan bantuan dari pemerintah Kuwait dalam pengadaan rumah sebanyak 40 buah

Kondisi bangunan fisik permukiman nelayan di UDN pada umumnya dalam kondisi kurang layak huni dan tidak memenuhi kriteria rumah sehat. Kurangnya pemeliharaan terhadap tempat tinggal, kebersihan rumah dan lingkungannya yang tidak terjaga dengan baik, menyebabkan kondisi permukiman tampak kumuh dan kotor.

Sebenarnya beberapa keluarga yang telah mapan ekonominya secara swadaya telah membangun kembali rumah-rumah asli bantuan presiden tersebut menjadi rumah permanen yang telah memenuhi persyaratan sederhana rumah sehat. Namun karena pemeliharaan terhadap lingkungan sekitar kurang, menjadikan lingkungan permukiman tampak kumuh dan kotor.

Berikut ini disampaikan kondisi fisik rumah beserta lingkungan sekitarnya secara lebih rinci dan detail, sebagai hasil observasi langsung dan hasil wawancara dengan penghuninya secara langsung.

### 1. Kondisi Penutup Atap Bangunan

Untuk dapat memenuhi persyaratan rumah sehat, maka atap tempat tinggal harus rapat dan tidak bocor. Kondisi atap rumah di kawasan Bandengan semua berupa atap genteng. Namun beberapa rumah dari 40 unit rumah ada yang bocor dan perlu perbaikan.

Berikut ini disampaikan visualisasi kondisi atap rumah di kawasan Bandengan pada gambar berikut ini.

#### GAMBAR 1

#### Kondisi Atap Rumah Penduduk di Kawasan Bandengan



*Empat puluh rumah di UDN semuanya sudah berupa atap genteng dengan kondisi masih bagus, namun beberapa rumah yang sudah usang dan belum pernah diganti atapnya sejak awal pembangunan, banyak yang bocor dan perlu perbaikan, agar memenuhi kriteria rumah sehat: "atap harus rapat dan tidak bocor".*

*Sumber: Survey primer – Tim Peneliti, 2005*

### 2. Kondisi dan Jenis Lantai

Bangunan asli rumah di kawasan Bandengan semua berlantai plester semen. Namun karena sudah lamanya usia bangunan banyak yang sudah retak dan rusak. Sebagian besar telah diperbaiki sendiri oleh penghuninya. Namun rumah yang telah dibangun baru oleh penduduk ada yang berlantai keramik, tegel/ ubin dan plester semen biasa.

Rumah-rumah asli yang telah mulai usang, kebanyakan lantainya telah rusak dan menjadi lantai tanah, dan tidak diperbaiki karena penduduk tidak mampu memperbaiki, dan sebagian lagi tidak peduli, karena bagi mereka tidak masalah. Lantai yang rusak terutama bagian depan rumah/ teras depan rumah.

Untuk rumah tambahan yang biasanya untuk menyimpan kayu, dapur dan gudang berlantai tanah dan sangat kotor, kondisinya lembab pada musim hujan dan musim kemarau berdebu, sama sekali tidak memenuhi standar rumah sehat yaitu kondisi lantai harus kering dan mudah dibersihkan.

## GAMBAR. 2

### Kondisi Lantai Rumah Penduduk di Kawasan Bandengan



Gambar diatas adalah rumah asli bantuan presiden di UDN yang belum mengalami perubahan, lantai telah rusak menjadi lantai tanah. Sedangkan gambar disampingnya adalah tampilan rumah tambahan yang berfungsi sebagai dapur dan gudang tampak dari luar (atas) dan bawah adalah bagian dalam rumah dengan lantai tanah.

Sumber: Survey primer – Tim Peneliti, 2005

### 3. Kondisi dan Jenis dinding

Kondisi dinding untuk rumah asli tampak kusam, kotor tidak terpelihara dengan baik karena alasan ekonomi dan lainnya tidak peduli karena tidak mengerti pentingnya rumah sehat. Rumah asli dindingnya terbuat dari kayu dan pasangan bata. Kondisi dinding kayu banyak yang telah lapuk, dan sebagian penduduk memperbaiki secara swadaya, namun sebagian yang tidak mampu tidak diperbaiki sama sekali. Rumah-rumah baru kualitasnya lebih baik dengan dinding dari tembok/pasangan bata, dan secara kualitas telah memenuhi standar rumah sehat.

Perilaku dan budaya kumuh masyarakat tidak memberikan jaminan bahwa pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah dalam hal ini dinding rumah, dapat membuat lingkungan permukiman menjadi lebih sehat. Karena di lokasi studi penduduk yang mampu secara ekonomi telah membangun secara swadaya rumah mereka, namun lingkungan tempat tinggal tetap kumuh, kotor dan tidak sehat. Bangunan tambahan, yang dibangun untuk dapur, gudang dan penyimpanan kayu kebanyakan berdinding bambu, biasanya dibangun dibelakang atau disamping rumah, dengan dinding dari bambu. Pembangunannya seadanya tanpa perencanaan sehingga lingkungan menjadi kumuh dan berhimpitan, tidak memperhatikan jarak antar bangunan.

### GAMBAR .3

#### Kondisi Dinding Rumah Penduduk di Kawasan Bandengan



Rumah asli dindingnya terbuat dari kayu dan pasangan bata. Kondisi dinding kayu banyak yang telah lapuk, dan sebagian penduduk memperbaiki secara swadaya, namun sebagian yang tidak mampu tidak diperbaiki sama sekali. Rumah-rumah baru kualitasnya lebih baik dengan dinding dari tembok/pasangan bata, dan secara kualitas telah memenuhi standar rumah sehat. Namun secara keseluruhan dengan lingkungan disekitar belum dapat dikatakan sehat, karena kebersihan lingkungan sekitar rumah tidak dipelihara dan dijaga dengan baik.  
Sumber: Survey primer – Tim Peneliti, 2005

### GAMBAR .4

#### Kondisi Bangunan Tambahan



Kondisi bangunan tambahan, dinding dari bambu, atap genteng dan lantai tanah. Kondisi demikian membuat lingkungan permukiman menjadi semakin kumuh, tidak beraturan, karena tata letak bangunan yang dibuat sembarangan. Penduduk tidak tahu tentang standar rumah sehat, dan bagaimana menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat.

Sumber: Survey primer – Tim Peneliti, 2005

#### 4. Kondisi pencahayaan alami dan sirkulasi/ ventilasi udara

Rumah asli telah didesain sesuai dengan standar rumah sehat. Pencahayaan alami dan ventilasi udara cukup baik. Sirkulasi udara dapat berjalan lancar. Rumah ditata berhadap-hadapan menghadap Utara dan Selatan, sehingga matahari dari arah Timur dapat masuk dengan baik. Jarak antar bangunan berdasarkan desain eksisting telah memenuhi standar kesehatan.

Namun pembangunan baru yang dilakukan oleh penduduk untuk memperluas rumah mereka dengan penambahan bangunan baru, tanpa perencanaan yang baik menyebabkan beberapa rumah saling berhimpitan satu sama lain sehingga sirkulasi udara tidak dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan syarat rumah sehat kebutuhan udara bersih didalam rumah  $\pm 9$  m<sup>3</sup>/orang, kebutuhan pergantian udara  $\pm 0,80$  m<sup>3</sup>/menit/orang, dan kebutuhan penerangan alam didalam kamar minimum 50 lux. Namun karena perilaku masyarakat yang tidak mengerti kebutuhan-kebutuhan ini menyebabkan rumah yang telah didesain sesuai standar kesehatan menjadi tidak sehat. Perilaku-perilaku ini ditunjukkan seperti:

- Jendela pada waktu pagi hari – siang tidak dibuka (seringkali jendela rumah tertutup rapat).
- Ventilasi rumah ditutup dengan plastik karena alasan banyak nyamuk (harusnya menggunakan kain kasa).

### **GAMBAR .5**

#### ***Kondisi Pencahayaan dan Sirkulasi Udara***



*Kondisi pencahayaan alami disiang hari disalah satu rumah penduduk yang bangunan rumahnya masih asli di UDN.*

*Pembangunan baru yang dilakukan oleh penduduk untuk memperluas rumah mereka dengan penambahan bangunan baru, tanpa perencanaan yang baik menyebabkan beberapa rumah saling berhimpitan satu sama lain sehingga sirkulasi udara tidak dapat berjalan dengan baik.*



*Jarak antar bangunan yang terlalu berhimpitan juga mempersulit untuk mendapatkan pencahayaan alami sesuai standar rumah sehat.*

## **D. Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan kondisi di atas terlihat bahwa perlu adanya proses adaptasi masyarakat di dalam pengadaan rumah (housing delivery) karena selama ini yang terjadi bahwa paradigma yang digunakan adalah deterministik artinya pengadaan rumah hanya mengacu pada pemikiran sekelompok orang tanpa mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat yang menjadi kelompok sasaran.

### **Saran**

1. Dikaitkan dengan sistem pengadaan rumah (housing delivery) tampaknya terdapat potensi yang sangat besar di masyarakat yang memerlukan uluran tangan dari pihak-pihak lain yang berfungsi sebagai

enabler untuk menjembatani mereka dalam mengakses berbagai sumber daya yang diperlukan bagi pengadaan huniannya sendiri.

2. Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan pemerintah tidak lagi sebagai “provider” melainkan sebagai “enabler” maka upaya yang harus dilakukan adalah mendorong masyarakat menjadi provider bagi pembangunan perumahannya sendiri. Upaya tersebut harus dilakukan dengan berbagai tindakan dan strategi agar dalam pelaksanaannya dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

## E. Kepustakaan

- Kusnadi, 2000., *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. HUP Bandung
- Kusnadi, 2004., *Polemik Kemiskinan Nelayan*, Pondok Edukasi & Pokja Pembaruan Yogyakarta
- Pascione. Miichael., 1984., *Rural Geography*., Harper an Row Publisher London
- Rapoport, A., 1984, “*Asal-Usul Budaya Pemukiman, dalam Pengantar Perencanaan Kota*.” Penyunting Catanese J. A., dan Snyder, terjemahan Sasongko, Airlangga, Jakarta
- Riyadi, Dodi Slamet., 2000., Konsep Dasar Penataan Ruang Wilayah Perdesaan, dalam *Pengembangan Wilayah Perdesaan dan Kawasan Tertentu*., Direktorat Kebijaksanaan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah, BPPT Jakarta
- Satria, Arif. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta Selatan.
- Silas. J., 1995., *Peran Perumnas dalam Tantangan Tugas*, Hasil Perjalanan 1974-1994 Perum Perumnas Jakarta
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Aditama, Bandung.
- Sultan Hidayat., 2003., *Draft Panduan Penyusunan Pemampuan Pembangunan Perumahan dan Permukiman oleh Masyarakat*., Ditjen Perumahan dan Permukiman Departemen Kimpraswil Jakarta
- Sumiarto,. 1983, “*Perumahan dan Permukiman: Sejarah dan Tantangannya di Masa Depan*”, Jurnal Forum Perencanaan dan Pembangunan, Vol. 1. No. 2 Des. PSPPR UGM.
- Zahri Nasution, dkk., 2007., *Sosial Budaya Masyarakat Nelayan: Konsep dan Indikator Pemberdayaan*., Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Jakarta